

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK SARANG  
BURUNG WALET DI UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Ilmu Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

Sukrizal

NPM : 147110336

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**PEKANBARU**

**2019**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Sukrizal  
NPM : 147110336  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan criteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

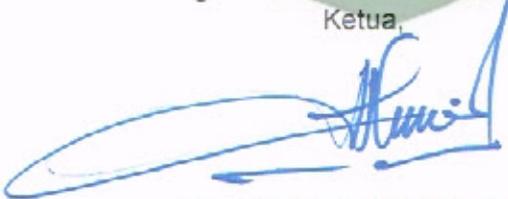
Pembimbing I,

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Pekanbaru, 11 April 2019  
Pembimbing II,

  
Andri Kurniawan, BPM., M.Si

Turut Menyetujui  
Program Studi Administrasi Publik  
Ketua,

  
Hendry Andry, S.Sos.,M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Sukrizal  
NPM : 147110336  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 04 April 2019

Ketua,

Sekretaris,

  
Arief Rifai Harahap, S.Sos., M.Si

  
Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Anggota

  
Andri Kurniawan, BPM., M.Si

Mengetahui,  
Wakil Dekan 1

  
H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

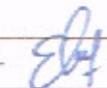
---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 337/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 02 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, kamis tanggal, 04 April 2019 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Sukrizal  
NPM : 147110336  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.

Nilai Ujian : Angka : " 79,4 " ; Huruf : " B+ "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Arief Rifai Harahap, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Indra Safri, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Andry Kurniawan, BPM., M.Si.	Anggota	4. 
5.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Afrizal, SE., M.Si.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 04 April 2019

An. Dekan,

**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid/Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 327/UIR-FS/KPTS/2019**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Sukrizal
N P M	: 147110336
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.

1. Arief Rifai Harahap, S.Sos., M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Emma Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Indra Safri, S.Sos., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Nurmasari, S.Sos., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Afrizal, SE., M.Si	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 02 April 2019  
An. Dekan,

DR. H. Panca Setyo Prihatin, S.Ip., M.Si  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miltik :

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. Arsip — sk. penguji —

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sukrizal  
NPM : 147110336  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 11 April 2019

An. Tim Penguji  
Sekretaris

Ketua

Arief Rifai Harahap, S.Sos., M.Si.

Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui  
Wakil Dekan I

Turut Menyetujui  
Program Studi Admnitrasi Publik  
Ketua,

Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Lampiran 5

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR  
Nomor:656/UIR-Fs/Kpts/2017 Tentang :  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA  
DEKAN FISIPOL UIR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen pembimbing;  
2. Bahwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. SK Mendiknas. No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
4. SK Rektor No.141/UIR/Kpts/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR;  
5. SK Rektor No. 112/UIR/KPTS/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.
- Memperhatikan: Rekomendasi Kajur. dan WD.I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;
- Menetapkan : 1. **MEMUTUSKAN**  
Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:
- I. Nama : Indra Syafri, S.Sos., M.Si.  
NIP/NPK : 970702230  
Pangkat/Jabatan : III/c - Lektor  
Kedudukan : Pembimbing I
- II. Nama : Andri Kurniawan, B.PM., M.Si  
NIDN : 1014068604  
Pangkat/Jabatan : III/b - Ass. Ahli  
Kedudukan : Pembimbing II
- Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:  
Nama : Sukrizal  
NPM : 147110336  
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi / Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis.
2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada SK Dekan No. 001/Fs-UIR/Kpts- PK/2010 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru;  
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;  
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.
- Kutipan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Disetujui dan Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 23 Agustus 2017  
Dekan,  
Dr. H. Morris Adidi Yasin, M.Si.

- Tembusan, disampaikan kepada:
1. Yth. Bapak Rektor UIR
  2. Yth. Ketua Prodi Adm. Publik
  3. Yth. Ka. Labor Adm. Publik
  4. Arsip, --SK Pembimbing.

Lampiran 6



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Gedung Menara Lintang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/14667  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

182010  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Nomor : 1513/IE-UIR/27-FS/2018 Tanggal 12 Oktober 2018, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : SUKRIZAL
2. NIM / KTP : 147110336
3. Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Serang Burung Walet Pada UPT Badan Pendapatan daerah Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis
7. Lokasi Penelitian : UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 16 Oktober 2018



Disematangkan Secara Elektronik Oleh  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

EVAREPITA SE. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720528 199703 2 004

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bengkalis
3. Dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Berbangkutan

Lampiran 7



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKALIS**

JALAN ANTARA NO. 445 TELP. (0766) 21057  
Website : www.kesbangpol.bengkalis.kab.go.id | email : kesbangpolbks@yahoo.com  
**BENGKALIS**

Bengkalis, 29 Oktober 2018

Nomor : 070 / BKBP / 500 / 2018  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth :  
Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah  
Kec.Rupat Utara Kab.Bengkalis

di  
Tanjung Medang

1. Memperhatikan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/14667 tanggal 16 Oktober 2018, perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : SUKRIZAL  
NIM : 147110336  
Program Studi : Administrasi Publik  
Universitas : Universitas Islam Riau  
Jenjang : S.1  
Alamat : Jl.Tun Selun Desa Kadur Kec. Rupat Utara

Bermaksud mengadakan riset / pra riset dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul :

**"EVALUASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS"**

2. Lokasi Penelitian : UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis
3. Untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
4. Penelitian ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.
5. Demikian untuk Saudara maklumi.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKALIS  
KABID PENANGANAN KONFLIK, KETAHANAN SENI,  
BUDAYA, AGAMA, BEMASYARAKATAN DAN EKONOMI

Drs. H. SURATMAN M.H.  
PEMBINA  
NIP. 19630912 199403 1 005

**TEMBUSAN :** disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bengkalis
2. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
- ④ Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
UPT PENDAPATAN DAERAH  
KECAMATAN RUPAT UTARA

JALAN RUPAT No. \_\_\_\_\_ TELP. \_\_\_\_\_ Email: upt\_bapendarupat\_utara@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 900/UPT-RU/72/2018  
Lampiran : -  
Hal : Penelitian

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kec. Rupert Utara menyatakan bahwa :

1. Nama : Sukrizal
2. Alamat : Jl. Tun Selun Desa Kadur Kec. Rupert Utara.
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Judul Proposal : "EVALUASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN RUPAT UTARA".
5. Kegiatan/ Tujuan : Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (skripsi) di UPT Pendapatan Daerah Kec. Rupert Utara.
6. Lokasi Penelitian : Kantor UPT Pendapatan Daerah Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis.
7. Waktu Penelitian : 2 (dua) Bulan.
8. Status Penelitian : Baru
9. Nama Lembaga : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU.

Benar adanya bahwa SUKRIZAL melakukan Penelitian di UPT Pendapatan Daerah Kec. Rupert Utara dengan Judul "EVALUASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN RUPAT UTARA".

Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tanjung Medang, 05 November 2018  
KEPALA UPT PENDAPATAN DAERAH  
KECAMATAN RUPAT UTARA



NIP.19680624 199404 1 001



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

جامعة الإسلام الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62761674874 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI**

Nomor: 350 /A\_UIR/FS-5/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama	: Sukrizal
NPM	: 147110336
Program Studi	: Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis
Persentase Plagiasi	: 9%
Status	: Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi Turnitin (terlampir).

Hormat Kami  
Wakil Dekan Sid. Akademik

**H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si**  
NPK. 160702589

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 20 MARET 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# EVALUASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS

## ABSTRAK

Oleh  
Sukrizal

Kata Kunci :Evaluasi, Pelaksanaan, dan Pembayaran Pajak Sarang Burung walet

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis. Indikator penilaian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Evaluasi Masukan (*Input*), Proses (*Process*), Keluaran (*Output*), Dampak (*Outcome*). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Tipe Deskriptif Kuantitatif*, Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, Jumlah populasi sebesar tiga puluh lima orang, sampel untuk bagian Pegawai UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara penulis mengambil teknik penarikan secara sensus yang berjumlah enam orang. Sedangkan untuk sampel yang menjadi responden wajib pajak dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik simple random sampling agar mudah mengumpulkan informasi dengan jumlah empat belas orang. Teknik pengumpulan data digunakan secara kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data digunakan teknik persentase (skala likert) dan teknik menentukan hipotesis (statistic deskriptif). Hasil penelitian dilampirkan berupa tabel frekuensi dan dijelaskan secara deskriptif, hasil penilaian pada indikator “*Input*” berada pada kategori Baik. Berdasarkan penilaian pada indikator “*Proses*” pada kategori Baik. Berdasarkan penilaian pada indikator “*Output*” berada pada kategori Baik. Berdasarkan penilaian pada indikator “*Outcome*” berada pada kategori Baik. Hasil penelitian Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Yang Ditentukan Dari 4 Indikator Yaitu *Input*, *Process*, *Output*, Dan *Outcome* dapat dikatakan Baik. Saran yang peneliti dapat berikan adalah Untuk mencapai target pajak sarang burung walet pihak UPT Bapenda sebaiknya harus melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat secara rutin, sehingga masyarakat khususnya pelaku usaha sarang burung walet dapat mengetahui arti penting akan kewajiban dalam membayar pajak, Diharapkan kesadaran dan peran serta pengusaha walet lebih ditingkatkan lagi dan memiliki rasa tanggung jawabakan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak sarang burung walet.

***EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF TALE PILLOWS PAYMENT  
IN THE UPT REGENCY OF RUPAT UTARA DISTRICT, BENGKALIS  
DISTRICT***

***ABSTRACT***

***By***

***Sukrizal***

*Keywords: Evaluation, Implementation, and Payment of Taxes for Swallow's Nest*

This study aims to determine and evaluate the implementation of payment for swallow's nest tax in the UPT Regional Revenue Agency Rupert Utara District, Bengkalis Regency. The assessment indicators used in this study are Input Evaluation (Input), Process (Process), Output (Output), Impact (Outcome). The type of research used in this study is Quantitative Descriptive Type, The location of this study was carried out at the Office of the Regional Revenue Unit of North Rupert Subdistrict, Bengkalis Regency. The population was thirty-five people. The sample was for the UPT District Regional Revenue Staff. census totaling six people. As for the sample of respondents who are taxpayers in this study the researchers used a simple random sampling technique to easily gather information with a total of fourteen people. Data collection techniques used in questionnaires, interviews, observation and documentation, data analysis techniques used percentage techniques (Likert scale) and the technique of determining hypotheses (descriptive statistics). The results of the study are attached in the form of a frequency table and explained descriptively, the results of the assessment on the "Input" indicator are in the Good category. Based on the assessment on the "Process" indicator in the Good category. Based on the assessment on the "Output" indicator in the Good category. Based on the assessment on the "Outcome" indicator, it is in the Good category., Bengkalis Regency, were determined from 4 indicators, namely input, process, output, and outcome. Suggestions that researchers can give are: To achieve the target of swallow nest tax, the UPT Bapenda should conduct socialization or counseling to the community regularly, so that the community, especially the swallow nest business actors, can know the importance of obligations in paying taxes. Swallow entrepreneurs are further enhanced and have a sense of responsibility for their obligations as taxpayers in paying for swallow's nest tax.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr,Wb

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa atas rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini,denganjudul “Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis“ ini dapat tersusun dengan selesai, tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penulisan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta didalamnya. Untuk itu, pada kesempatan yang baik inipenulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H. Syafrinaldi, SH.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau Yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr.H. Moris Adidi Yogia,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos.,M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Pblk dan jajaran dD osen pada jurusan Ilmu Administrasi publik yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

4. Bapak Indra Safri,S.Sos.,M.Si selaku pembimbing 1 dan B apak Andri Kurniawan,B.PM.,M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta masukan dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Bapak/Ibu Dosen, Khususnya pada jurusan Ilmu Administrasi publik dan seluruh staf/pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru pada umumnya, yang telah membimbing penulis selama kuliah dan memberi kemudahan kepada penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi yang berlaku dalam perkuliahan.
6. Kepada Bapak Idris, Amd selaku kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini, termasuk dalam pemberian data dan juga dukungan lainnya.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ujang dan Ibunda Sumainah, Adinda saya Siti Suhaiza dan Rayyan Uzairi, serta keluarga dari sebelah Ayahanda dan Ibunda, yang selama ini telah memberi dukungan dalam perkuliahan baik secara materil, doa, dan motivasi
8. Kepada Sahabat-sahabat terbaik saya selama masa perkuliahan Agus Suherman, Iksan Ramadani, M.Aidil Putra, Bella Arisfa Rianti dan Lentera Hardiyanti serta rekan-rekan Administrasi Publik angkatan

2014 Khususnya kelas C yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama perkuliahan ini.

9. Kepada Khaidir Ali S.AP, Riswadi, Yazid, M.Hazwan, Rosmiatin, Eka Permata Sari, dan Cristin Manora serta kawan-kawan SMA yang lainnya yang senantiasa setia memberi dukungan, semangat, dan doa.

Dalam penyusunan naskah skripsi ini, banyak hambatan dan tantangan yang penulis temui. Oleh karena itu, apabila pembaca menemukan kesalahan dan kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna koreksi dan penyempurnaan skripsi ini kedepannya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalas jasa baik mereka dengan rahmat dan karunia yang setimpal. Amiin Ya Allah Ya Rabb, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama.

Wassalamualaikum Wr,Wb

Pekanbaru, 15 April 2019

Sukrizal

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	iii
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMFEREHENSIF SKRIPSI .....</b>	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	v
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xvi
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....</b>	xvii
<b>ABSTRAK .....</b>	xviii
<b>ABSTRACT .....</b>	xix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan keinginan Penelitian .....	11
1. Tujuan penelitian .....	11
2. Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	12
A. Studi Kepustakaan .....	12
1. Konsep administasi .....	12
2. Konsep organisasi.....	14
3. Konsep Manajemen .....	16
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	17
5. Konsep Pengawasan .....	21
6. Konsep Kebijakan .....	23
7. Konsep Evaluasi .....	24
8. Konsep Evaluasi Kebijakan.....	26
9. Konsep Pelaksanaan .....	28
10. Konsep Sistem .....	29
11. Konsep Pajak .....	30

12. Konsep pajak daerah.....	34
B. Kerangka Pikir.....	36
C. Konsep Operasional.....	38
D. Operasionalisasi Variabel.....	40
E. Teknik Pengukuran.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Tipe Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Populasi atau Sampel.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Rupert Utara.....	49
B. Gambaran Umum UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara.....	50
C. Tugas dan Fungsi UPT Badan Pendapatan Daerah.....	52
D. Keadaan Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Menurut Pendidikan.....	53
E. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara.....	53
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Identitas Responden.....	56
1. Tingkat Pendidikan.....	56
2. Jenis Kelamin.....	57
3. Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	58
B. Hasil Penelitian.....	59
1. Masukan ( <i>Input</i> ).....	60
2. Proses ( <i>Process</i> ).....	66
3. Keluaran ( <i>Output</i> ).....	71
4. Dampak ( <i>Outcome</i> ).....	75
C. Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden.....	77

<b>BAB VI : PENUTUP</b> .....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	83
<b>LAMPIRAN</b> .....	86



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.1 : Daftar Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016-2018 .....	04
I.2 : Daftar Wajib Pajak Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah KecamatanRupat Utara Tahun 2018 .....	07
I.3 : Laporan Tunggakan Pajak Sarang Burung Walet Kecamatan Rupert Utara Tahun 2016-2018.....	09
II.1 : OperasionalVariabel .....	41
III.1 : Jumlah Populasi Penelitian pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis .....	44
III.2 : Jumlah Sampel Penelitian Bagian Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara .....	45
III.3 : Jumlah Sampel Penelitian BagianWajib Pajak Sarang Burung Walet.....	45
IV.1 : Keadaan Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Menurut Pendidikan .....	53
V.1 : Identitas Responden Penelitian di UPT Badan Pendapatan Daerah KecamatanRupat Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	57
V.2 : Identitas Responden Penelitian di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
V.3 : Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia Penelitian di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara .....	58
V.4 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Terhadap Indikator Masukan ( <i>Input</i> ) .....	61
V.5 : Hasil Wawancara Terstruktur dengan Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utar Terhadap Indikator Masukan ( <i>Input</i> ) .....	64

V.6	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah KecamatanRupat Utara Terhadap Indikator Proses ( <i>Process</i> ) .....	66
V.7	: Hasil Wawancara Terstruktur dengan Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah KecamatanRupat Utara Terhadap Indikator Proses ( <i>Process</i> ) .....	69
V.8	:Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Terhadap Indikator Keluaran ( <i>Output</i> ) .....	71
V.9	:Hasil Wawancara Terstruktur dengan Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utar Terhadap Indikator Keluaran ( <i>Output</i> ) .....	73
V.10	:Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Terhadap Indikator Dampak ( <i>Outcome</i> ) .....	75
V.11	:Hasil Wawancara Terstruktur dengan Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Terhadap Indikator Dampak ( <i>Outcome</i> ) .....	77
V.12	: Hasil Rekapitulasi Dilihat Secara Bersama-sama Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet.....	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1: Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis.....	37



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar kuesioner (untuk wajib pajak sarang burung walet) penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis.....	86
2. Daftar Wawancara (untuk pegawai UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupa Utara) penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis.....	96
3. Hasil rekapitulasi jawaban responden tentang penelitian Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis.....	97
4. Foto dokumentasi penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis.....	98
5. SK Dekan Fisipol UIR No.656/UIR-Fs/Kpts/2017 tentang penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi an. Sukrizal.....	103
6. Surat Rekomendasi No.503/DPMPTSP/NON IZIN RISET/14667 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi an.Sukrizal .....	104
7. Surat Rekomendasi No.070/ BKBP/ 500/ 2018 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, perihal Rekomendasi Riset an.Sukrizal.....	105
8. Surat Keterangan Penelitian No.900/UPT-RU/72/2018 dari UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupa Utara, tentang penelitian dan Pengumpulan Data an.Sukrizal .....	106

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peran administrasi sangat berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan formal organisasi. Salah satu perwujudan kebutuhan suatu sistem pemerintahan yang sistematis tersebut awalnya diawali di Negara Kroasia dan Austria dikenal dengan sistem kameralisme (*cameralism*). Sistem ini dapat dikatakan sebagai awal mulanya administrasi Negara, kameralisme dirancang untuk mencapai efisiensi manajemen yang tersentralisasi dan paternalistik yang ditandai dengan corak perekonomian merkantilisme (Miftah Toha, 2011: 14). Merkantilisme (Inggris: *merchant* yang berarti pedagang) adalah nama yang diberikan untuk satu aliran dan praktek ekonomi. Merkantilisme menyatakan bahwa kesejahteraan suatu Negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu Negara (Ratna Hapsari 2013: 182).

Realisasi pajak di Indonesia mempunyai hubungan yang signifikan dengan penerimaan kas Negara. Semakin tinggi perolehan pajak maka akan semakin tinggi pendapatan Negara. Inovasi dalam pengelolaan pajak harus dicermati secara kreatif terhadap sumber pendapatan pajak. Salah satu potensi pajak dapat diperoleh dari hasil alam yaitu memanfaatkan potensi alami (sarang burung walet). Sarang burung walet merupakan sarang yang berkhasiat dan sangat berbeda dengan sarang burung-burung yang ada. Karena terbuat dari liur (saliva) atau air ludahnya sendiri merupakan zat yang berguna bagi tubuh manusia. Oleh

karena itu hasil produksi sarang burung walet mempunyai potensi nilai jual yang tinggi dan dapat dimanfaatkan bagi menggali sektor pendapatan di daerah.

Menurut Sahimah Khalil (42: 2004) Pajak adalah merupakan bayaran atau sumbangan wajib dari pelaku terhadap penerima yaitu pemerintah. Pajak yang dipungut ini digunakan untuk menyediakan atau mengeluarkan uang untuk kebijakan publik yang didistribusikan kepada sebagian masyarakat. Dengan demikian pajak merupakan pungutan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab XI Pasal 285 dijelaskan bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  1. Pajak daerah
  2. Retribusi daerah
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
  4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- d. Dana Perimbangan yaitu:
  1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
  2. Dana Alokasi Umum
  3. Dana Alokasi Khusus
  4. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi.
- e. Lain-lain Pendapatan yang Sah, misalnya Kompensasi PPh Gaji PNS.

Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab XI Pasal 285 di atas dijelaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah dapat diperoleh dari sektor Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011;12).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis diantaranya terdiri dari :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
7. Pajak Parkir; dan
8. Pajak Sarang Burung Walet.

Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah terutama pajak sarang burung walet adalah lebih mengsosialisasikan kepada wajib pajak pentingnya pajak sarang burung walet, melakukan pendataan dan serta pengawasan terhadap pajak daerah khususnya pengusaha sarang burung walet guna kepentingan umum dan pembangunan daerah.

Pajak sarang burung walet merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah dari jenis pajak, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini yang merupakan daftar realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis dari tahun 2016-2018

**Tabel I.1 Daftar Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018**

No	Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah	2016	2017	2018
1	Penerangan jalan PLN	13,249,698,304,00	14,456,350,652,00	11,594,757,893
2	Penerangan Jalan Non PLN	6,865,355,867,40	19,455,491,864,74	12,666,995,347,68
3	Restoran	7,563,260,512,22	5,701,501,569,70	4,409,716,760
4	Pajak Bumi Dan Bangunan-P2	6,445,826,564,00	6,242,306,582,00	3,671,245,381
5	Mineral Bukan Logam Dan Batuan	4,288,910,000,00	1,668,741,000,00	4,750,000
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	3,572,670,671,80	5,589,705,826,00	3,709,499,118
7	Hotel	2,696,705,260,69	1,876,882,828,80	1,771,337,391,60
8	Air Tanah	1,861,923,707,30	78,570,448,00	313,782,110,76
9	Hiburan	340,001,673,00	502,804,161,00	407,604,004
10	Parkir	321,582,200,00	315,668,400,00	223,665,000
11	Reklame	332,298,163,00	206,166,201,00	263,601,004
12	Sarang Burung Walet	316,095,000,00	160,785,000,00	141,162,000
	<b>Jumlah Per Tahun</b>	<b>47,854,327,923,41</b>	<b>56,254,974,533,24</b>	<b>39,178,116,010,04</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis 2019.

Jenis pajak sarang burung walet menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah berada pada urutan *dua belas* (12) setelah pendapatan pajak reklame dengan realisasi anggaran tiga tahunan terakhir yaitu tahun 2016, 2017 dan 2018. Realisasi Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Bengkalis dalam tiga tahun terakhir bervariasi. Peningkatan fluktuabilitas pajak untuk pajak sarang burung walet terbesar berada ditahun 2016 dengan total pendapatan sebesar Rp 316,095,000,00, dan terjadi penurunan pada tahun 2017 dengan total pendapatan Rp 160,785,000,00 Dan di tahun 2018 sebesar 141,162,000,

Salah satu penyebab turunnya penerimaan pajak dari sarang burung walet ini adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha sarang burung walet yang tidak tertib membayar pajak atas penyelenggaraan perusahaan sarang burung walet, sehingga dapat mengurangi pendapatan daerah.

Jika dikelola dengan administrasi dan manajemen yang baik maka usaha sarang burung walet dapat menjadi potensi sumber penerimaan daerah yang sangat potensial.

Adapun mekanisme pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet dapat dilihat skema dibawah ini:

Skema 1 : Pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet



Sumber : UPT Badan Pendapatan Daerah, 2019

Berbicara mengenai masalah pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet tentunya tidak terlepas dari kemampuan sumber daya manusia pelaku pajak yaitu pengusaha sarang burung walet yang melakukan pembayaran secara mandiri. Kemudian hasil pemeriksaan pajak secara mandiri tersebut diserahkan kepada *UPT Badan Pendapatan Daerah* yang kemudian akan diserahkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis dijelaskan bahwa peran UPT adalah Unit Pelaksana Teknis daerah yang bertugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan Pelayanan Dinas Pendapatan dilingkup kecamatan. Tertuang pada Bab IV tentang Unit Pelaksana Teknis pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis, yaitu:

Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (1)UPT adalah Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu atau sebagai kepanjangan Dinas dikecamatan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam daerah Kabupaten Bengkalis;
- (2)UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat;
- (3)Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, inovasi dari peraturan daerah dalam memanfaatkan efisiensi seharusnya dapat diukur dari wawasan atau kemampuan subjek pajak yaitu pelaku pajak menggunakan metode penghitungan pajak secara mandiri (*self assessment system*). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2002 bab II pasal 3 ayat 1 dan 2 bahwa :

- 1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan sarang burung walet.
- 2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak atas pengambilan dan atau memanfaatkan sarang burung walet.

Berikut dapat dilihat dari data Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang terdaftar di UPT Bapenda Kecamatan Rupa Utara.

**Tabel I.2 Daftar Wajib Pajak Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara tahun 2018**

No	Nama	Penghasilan Pajak
1	Kian Tjin	150/ 3 Bulan
2	Lian Gie	500/ 3 Bulan
3	Agie	75/ 3 Bulan
4	Adiang	300/ 3 Bulan
5	Kiong Beng	225/ 3 Bulan
6	Guan Beng	100/ 3 Bulan
7	Herman	150/ 3 Bulan
8	Anas	150/ 3 Bulan
9	Liong Cun	150/ 3 Bulan
10	Sumardi	375/ 3 Bulan
11	Kim Hui Astaman	100/ 3 Bulan
12	Atian	150/ 3 Bulan
13	Aho. P	300/ 3 Bulan
14	Lian Sun	150/ 3 Bulan
15	Ata	150/ 3 Bulan
16	Among	50/ 3 Bulan
17	Tiong Beng	150/ 3 Bulan
18	Lim Beng Cai	150/ 3 Bulan
19	Leng Ceng	75/ 3 Bulan
20	Bun Cuan	100/ 3 Bulan
21	Atai	100/ 3 Bulan
22	Tji Ong	100/ 3 Bulan
23	Mamat	25/ 3 Bulan
24	Ason	150/ 3 Bulan
25	Dafid	150/ 3 Bulan
26	Mardi	150/ 3 Bulan
27	Ucu Budi	150/ 3 Bulan
28	Heriyanto	150/ 3 Bulan
29	Seng Bei	150/ 3 Bulan

Sumber : UPT Badan Pendapatan Daerah Kec. Rupert Utara

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyadari bahwa semakin maraknya penangkaran sarang burung walet sebagai bentuk fenomena di tengah masyarakat, adapun kekhawatiran yang mendasar adalah realisasi pajak belum efektif karena masih ada pelaku usaha yang menungak pajak.

Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah terutama pajak sarang burung walet adalah lebih

mensosialisasikan kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak sarang burung walet, melakukan pendataan dan serta pengawasan terhadap pajak daerah khususnya perusahaan sarang burung walet guna kepentingan umum dan pembangunan daerah.

Sesuai dengan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Sarang Burung Walet mengatakan bahwa :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada kabupaten, maka dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan, daerah mempunyai wewenang menggali potensi yang ada didaerahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Bahwa pemanfaatan sarang burung walet yang berada di habitat buatan adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat diatur dan dipungut;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk meneliti sampai sejauh mana penerimaan pendapatan dari jenis pajak sarang burung walet mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis. Karena didalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Sarang Burung Walet mengatakan bahwa Tarif pajak ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari nilai jual sarang burung walet.

Akan tetapi, pada tahun 2018 penerimaan pajak sarang burung walet mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal tersebut terjadi karena adanya penunggakan pembayaran oleh pelaku usaha sarang burung walet khususnya

wilayah Kecamatan Rupert Utara yang mana Pajak Sarang Burung Walet ini di kelola dan dipungut oleh pihak UPT Bapenda Kecamatan Rupert Utara, hal tersebut dapat kita lihat pada laporan tunggakan Pajak Sarang Burung Walet Kecamatan Rupert Utara.

**Tabel I.3 Laporan Tunggakan Pajak Sarang Burung Walet Kecamatan Rupert Utara Tahun 2016, 2017 dan 2018**

Tahun	Wajib Pajak Bayar	Wajib Pajak Menunggak	Total Wajib Pajak Per Tahun
2016	14	11	25
2017	8	21	29
2018	7	22	29
Total	26	54	83

*Sumber : UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara*

Rekapitulasi Data Laporan Tunggakan Pajak Sarang Burung Walet Kecamatan Rupert Utara Tahun 2016, 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa tidak terjadi keseimbangan data dikarenakan pelaku usaha sarang burung walet mengalami pailit.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan fenomena-fenomena Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, peneliti memperoleh informasi dari UPT Badan Pendapatan daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis dan melakukan wawancara langsung bahwasannya:

1. Terindikasi meningkatnya penunggakan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet setiap tahunnya yang menyebabkan pengurangan PAD dari Pajak Sarang Burung Walet.

2. Terindikasi minimnya sosialisasi kepada pelaku usaha sarang burung walet dalam membayar pajak sehingga tingkat partisipasi dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak berkurang.
3. Adanya indikasi masih banyaknya wajib pajak sarang burung walet yang tidak mengikuti prosedur dan aturan pembayaran pajak dengan baik sehingga pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet kurang maksimal.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa fenomena yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rukat utara Kabupaten Bengkalis dengan rumusan masalah sebagai berikut :

**“Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis?”**

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian :

Untuk mengevaluasi bagaimanakah pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rukat Utara di Kabupaten Bengkalis.

### 2. Kegunaan Penelitian :

- a. Guna Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan bagi peneliti dibidang administrasi publik yang ingin melakukan penelitian sesuai dengan fenomena, minimal dapat memperkaya inventaris hasil penelitian dibidang rumpun ilmu administrasi.
- b. Guna Akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berupa data sekunder bagi kalangan akademisi dibidang rumpun ilmu administrasi.
- c. Guna Praktis, diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam melihat fenomena pajak sarang burung walet.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi kepustakaan

Sebagai landasan penelitian ini, penulis akan mengemukakan beberapa teori yang penulis anggap relevan dan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini khususnya teori tentang Administrasi, pelayanan, publik, dan Pelayanan Publik

##### 1. Konsep Administrasi

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pemimpin, dan pemerintahan, penegelolaan”(dalam Wirman Syafri, 2012:3)

Selain itu, administrasi juga memiliki arti sebagai ketatausahaan yang dalam bahasa inggrisnya dipergunakan istilah *clerical work*, *paper work*, *officework* atau lebih tepatnya administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/ kode surat, peneketikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau dikeluarkan oleh organisasi/ institusi.

Dari berbagai pengertian istilah tersebut bahwa kesimpulan administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu dan komitmen yang sudah dibuat bersama untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya(dalam Wirman Syafri, 2012;12).

Hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen adalah administrasi keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, organisasi adalah wadah, dan manajemen adalah ilmu atau seni atau cara untuk mengendalaikan atau mengelola proses kerja sama tersebut demi pencapaian tujuan suatu kelompok yang sudah bekerja sama tadi. Jika ketiga unsur itu terpenuhi dengan baik, maka pencapaian tujuan akan berhasil sesuai target.

Menurut The Ling Gie administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu (dalam Syafie 2003;4).

Selanjutnya The Ling Gie (dalam Zulkifli, 2005;28) menerangkan bahwa terdapat 3 (tiga) pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah defenisi konsep administrasi tersebut:

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni, keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terkait kepada aspek kondisi, situasi, waktu, dan tempat diman dia jalankan.
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur, adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dijalankan, adanya perlengkapan dan

peralatan untuk melaksanakan tugas dan adanya pertimbangan yang rasional dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.

3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerja sama bukan merupakan konsep yang baru; dia sudah ada sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan tergambar dari ungkapan yang dikemukakan oleh Herbert. Simon apabila ada dua orang yang berkerja sama untuk menggulingkan sebuah batu yang tidak dapat digulingkan hanya satu orang diantara mereka, pada saat itu administrasi telah ada.

Berdasarkan berbagai pendapat tentang administrasi diatas, dapat disimpulkan bahwa batasan administrasi ialah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Karena kerja sama tersebut harus ada wadahnya, yaitu organisasi, batasan lengkap administrasi adalah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang dalam wadah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

## **2. Konsep Organisasi**

Konsep organisasi merupakan diaplikasikan setiap aspek studi administrasi. Keberadaan setiap aspek studi administrasi dimaksud untuk memberikan dukungan kepada setiap kebijakan manajerial dan operasional

Organisasi menurut Siagian ( 2003 : 6 ) adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat

dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Organisasi sebagai tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan terciptanya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada semua anggota organisasi, akan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang mana organisasi memiliki keragaman yang nantinya akan memberikan dampak bagi organisasi tersebut (Gaus dalam Hamim 2005:13).

Menurut Karl Weick (dalam Zulkifli 2005;129) ” *Organization is defined as consensually validated grammar for reducing equivocality by means of sensible interlocked behaviors*”. Pendapat ini menunjukkan bahwa organisasi merupakan daya upaya untuk mencapai kesepakatan yang tepat untuk mengurangi ketidakjelasan dari hubungan perilaku yang pantas satu dengan yang lainnya.

Waldo dalam Hamim (2005 : 13) organisasi merupakan struktur hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal dan kebiasaan dalam suatu sistem administrasi. Rancangan struktur yang baik akan tergambar kegiatan sekaligus monitoring efektivitas dan perhatian terhadap manfaat struktur tersebut.

Siswanto (2005;73) organisasi adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Organisasi minimal mengandung tiga elemen yang saling berhubungan, yaitu sekelompok orang, interaksi dan kerja sama, dan tujuan bersama.

### 3. Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata kerja (*to manage*) yang berarti menangani, mengendalikan, menguasai, mengurus, menyelesaikan sesuatu. Manajer adalah seseorang yang disertai tugas memimpin dan mengurus suatu tugas, lembaga, usaha dan sebagainya.

Menurut Manulang (dalam Zulkifli dan Nurmasari 2015;4) pengertian manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian:

- a. Manajemen sebagai proses
- b. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
- c. Manajemen sebagai ilmu (*science*) dan seni (*art*).

Sondang P. Siagian (2003) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain

Dari penjelasan diatas manajemen diartikann sebagai seni dan ilmu, yaitu seni yang dimaksud sebagai suatu keahlian, kemahiran, kemampuan, dan keterampilan dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan, sementara manajemen suatu ilmu ialah akumulasi pengetahuan yang telah disistematiskan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran umum (*general purpose*) dalam Siswanto (2005;3)

Selanjutnya Malayu S.P. Hasibuan (2002;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari 6 unsur (6M) yaitu: *Ma, Money, Methode, Machines, Materials, dan Market.*

Menurut G.R Terry manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan *planing, organizing, actuating, dan controlling*, dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula dalam Sufian Hamim (2003; 36)

Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya *pengelolaan, pembinaan, pembinaaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, administrasi, dan sebagainya.*

#### **4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia**

Fenomena social pada masa kini dan masa depan dalam era globalisasi ini, yang sangat menentukan adalah manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai sumber unsur terpenting mutlak, dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut, tenaga, waktu dan kemampuannya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi maupun bagi kepentingan individu. Dapat kita ketahui dalam manajemen terdapat beberapa unsur, yang antara lainnya adalah :

- 1) *Man* (Manusia)
- 2) *Money* (Uang)
- 3) *Materials* (Bahan-bahan/ perlengkapan)
- 4) *Machines* (Alat-alat)
- 5) *Method* (Cara-cara Kerja)
- 6) *Market* (Pasar)

Dalam perkembangannya unsur *Man* (Manusia) telah berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut sebagai sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia itu sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari khusus pada suatu unsur manajemen tersebut yaitu *man* (manusia).

Tanpa sumber daya manusia, maka sumber daya lainnya akan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan dari organisasi, maka untuk itu diperlukan manajemen sumber daya manusia sebagai pengatur bagaimana untuk menjalankan sebuah organisasi yang dibentuk dengan memanfaatkan sumber daya organisasi.

Menurut Hasibuan (2013;10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan, perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Fungsi manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Hasibuan (2013;21-23) antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan  
Perencanaan (*Human Resources Planing*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.
2. Pengorganisasian  
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi (*organization chat*)
3. Pengarahan  
Pengarahan (*Directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien

dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

4. Pengendalian  
Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.
5. Pengadaan  
Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
6. Pengembangan  
Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Kompensasi  
Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.
8. Pengintegrasian  
Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.
9. Pemeliharaan  
Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.
10. Kedisiplinan  
Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.
11. Pemberhentian  
Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari perusahaan.

Menurut Ernie dan Kurniawan (2010;196) secara garis besar proses manajemen sumber daya manusia dibagi kedalam lima bagian fungsi utama yang terdiri dari :

1. *Human Resource Planning*, merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan.

2. *Personal procurement*, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi dan penempatan serta kontrak tenaga kerja.
3. *Personal Development*. Mengembangkan sumber daya manusia, termasuk didalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan.
4. *Personal maintenance*. Memelihara sumber daya manusia, termasuk didalamnya pemberian penghargaan, insentif, jaminan kesehatan, dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya.
5. *Personal Utilization*, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk didalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi.

Selain itu menurut Amirullah (2004:206) mengemukakan Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan kegiatan yang mengatur tentang cara pengadaan tenaga kerja, melakukan pengembangan, memberikan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja melalui proses-proses manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya organisasi yang berfungsi sebagai penggerak dalam kegiatan organisasi guna mencapai tujuan-tujuan organisasi.

## 5. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang juga mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi perencanaan. Dengan demikian pengawasan tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa kegiatan perencanaan, dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Handoko (2009;366) mengatakan ada beberapa faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, faktor-faktor nya sebagai berikut :

1. Perubahan lingkungan organisasi. Melalui pengawasan perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan.
2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati.
3. Kesalahan-kesalahan. System pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.
4. kebutuhan manajer untuk mendelegasi wewenang. Tanpa sistem pengawasan, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahannya.

Menurut Siagian (2003;115) mengatakan bahwa proses pada dasarnya dilaksanakan dengan menggunakan dua macam teknik, yaitu :

1. Pengawasan langsung (*direct control*), ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya, pengawasan langsung ini dapat berbentuk:

- a. Inspeksi langsung
  - b. *The Spot Observation* (pengamatan tempat), dan
  - c. *On The Spot Report* (laporan tempat)
2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*), ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, laporan ini berbentuk:
- a. Tertulis
  - b. Lisan

Menurut silalahi (2002;391) pengawasan adalah kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standard dan tujuan organisasional yang diharapkan. Kinerja actual diketahui dari usaha-usaha optimis pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas, sementara kesesuaian antara kinerja aktual dan tujuan yang diharapkan diketahui dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar organisasi.

Jadi, berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 6. Konsep Kebijakan

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijakan sering kali disamakan pengertiannya dengan *policy*. Hal tersebut sering kali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* kedalam bahasa Indonesia.

Selanjutnya Wahab (2005;3) mengemukakan bahwa:

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, sekelompok dan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya sesuatu masalah/hambatan tertentu, dan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Menurut Anderson (dalam Nurcholis, 2007;263) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi, menurut (Islamy, 2002;25) faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

- a. Adanya pengaruh-pengaruh tekanan luar,
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama,
- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi,
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar,
- e. Adanya pengaruh dimasa lalu.

Thomas R. Dye (dalam Nurcholis, 2007;264) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Irfan Islamy mengemukakan (Dalam Winarno, 2002;36) Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan dalam mencapai tujuan tertentu.

## 7. Konsep Evaluasi

Menurut Nurcholis (2007;277) Evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Menurut Ndraha (2003;201) Evaluasi adalah proses perbandingan antara perbandingan dengan fakta dan analisis hasilnya. Selanjutnya menurut Ndraha (2003;202) ada berbagai model evaluasi, tiga diantaranya sebagai berikut :

- a. Model *Before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku, tretment). Tolak ukurnya adalah *Before*.

- b. Model *Das Sollen-Das Sein*, yaitu perbandingan antara seharusnya dengan senyatanya tolak ukurnya adalah *Das Sollen*.
- c. Model kelompok Kontrol-Kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok control.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Gomes, 2006;185) Evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan akan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Istilah Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (*Appraisal*), pemberian angka (*Rating*), dan penilaian (*Assesment*), kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Menurut Dunn (2003;608).

Wirawan (2011;16) tentang evaluasi dapat diartikan sebagai proses mekanisme untuk memonitor, mensistematikan, dan meningkatkan aktivitas pemerintah dan hasil-hasilnya sehingga pejabat publik dalam pekerjaannya dimasa yang akan datang dapat bertindak serta bertanggung jawab, kreatif, dan seefisien mungkin. Ada 4 unsur dari pengertian ini yakni evaluasi itu :

- a. Input (*Input Evaluation*)
- b. Proses (*Process Evaluation*)
- c. Manfaat (*Outcome Evaluation*)
- d. Akibat (*Impact Evaluation*)

Selanjutnya menurut Zulkifli 2009;137) Evaluasi (penilaian) merupakan suatu proses analisis data yang diperoleh melalui proses pengawasan untuk menentukan hasil factual dari pelaksanaan pengawasan itu.

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Evaluasi yaitu penilaian dan merupakan bagian yang integral dari proses pelaksanaan sistem pengawasan. Penilaian merupakan suatu proses analisis data yang diperoleh melalui proses pengawasan untuk menentukan hasil faktual dari pelaksanaan pengawasan itu. Jika demikian halnya perbedaan mendasar antara pengawasan dengan penilaian terletak pada aspek orientasi waktu, sasaran, dan pemanfaatan.

## **8. Konsep Evaluasi Kebijakan**

Untuk menentukan keberhasilan sebuah kebijakan maka perlu dilakukan penilaian dari sebuah kebijakan yang telah diimplementasikan oleh unit pelaksana kebijakan.

Evaluasi kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh *Input, Process, Output, dan Outcome* dari kebijakan pemerintah daerah. Evaluasi memiliki 4 tipe menurut Badjuri dan Yuwono (dalam Nurcholis, 2007;276).

- a. Evaluasi Kecocokan,
- b. Evaluasi Efektivitas,
- c. Evaluasi Efisiensi, dan
- d. Evaluasi Meta.

Menurut Abidin (2006;211) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan dan evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi awal, yaitu sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan.
2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau *monitoring*.
3. Evaluasi akhir, yaitu dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan.

Suchman (dalam Winarno, 2012;229) Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup subsidi, implementasi dan dampak.

Selain itu Winarno (2012;230) menyatakan terdapat beberapa tipe evaluasi kebijakan antara lain :

- a. Evaluasi kebijakan sebagai fungsional,
- b. Tipe evaluasi yang memfokuskan pada kebijakan tertentu, dan.
- c. Tipe evaluasi kebijakan sistematis

Ada enam langkah dalam evaluasi kebijakan menurut Suchman (dalam Winarno, 2012;233) yaitu :

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi,
- b. Analisis terhadap masalah,
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan,
- d. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi,
- d. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi,
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut,
- f. Beberapa indicator untuk menentukan keberadaan suatu dampak,

Evaluasi kebijakan adalah yang meliputi pencapaian tujuan dan akuntabilitas kebijakan yang telah di implementasikan, serta memberikan masukan terhadap kebijakan publik yang akan datang (Badjuri dan Yuwono, 2002;)

Dari beberapa defenisi menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian suatu kebijakan mencakup substansi, implementasi, dan dampak dalam suatu program.

### **9. Konsep Pelaksanaan**

Menurut Syaukani (2002;293) pelaksanaan merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut, kedua menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, ketiga bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit kemasyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ini merupakan fungsi manajemen yang sangat mendasar setelah adanya manusia dan organisasi, karena jika manusia yang ada didalam organisasi tidak mampu menjalankan roda organisasi maka sama saja seperti sebuah kendaraan tidak bisa dijalankan karena tidak adanya kunci kontak kendaraan tersebut.

## 10. Konsep Sistem

Menurut Sumantri (1976; 17), system merupakan sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya system yang sudah terwujud akan mendapat gangguan.

Pengertian tentang sistem juga dikemukakan oleh Pamudji (1981;4), system adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Sedangkan Admosudirdjo (1973) dalam Syafiie (2009; 1), mengemukakan bahwa sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bukan untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.

Gabriel A. Almond mengartikan system sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan yang mempengaruhinya maupun dipengaruhi. Sementara itu, Scoderbek memberikan definisi sistem dan sekaligus didalamnya mengandung penjelasan ciri-ciri sistem. Sistem didefinisikan sebagai seperangkat tujuan yang bersama-sama dengan interelasi diantara tujuan dan diantara atribut-atributnya dihubungkan satu sama lain, serta dihubungkan dengan lingkungan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu keseluruhan. Russel L. Ackoff bahkan secara

singkat membatasi system sebagai seperangkat elemen yang saling melakukan interaksi.(Santosa, 2008; 79)

## 11. Konsep Pajak

Secara umum pengertian pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan Negara yang berdasarkan peraturan berlaku sehingga dapat dipaksakan.

Menurut N.J. Feldman (dalam Azwirman, 2015;1) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Kemudian menurut Andriani (dalam Bohari, 2012;23) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Selanjutnya menurut Smeth (dalam Adisasmita, 2011;96) pajak adalah prestasi pemerintah yang berhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan untuk individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Selanjutnya menurut Rochmaat Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011;1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Selain itu Mardiasmo (2011, 1-2) menyatakan bahwa ada dua fungsi pajak antara lain :

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Mardiasmo (2011;7) menyatakan bahwa ada tiga asas pemungutan pajak yaitu :

1. Asas domisili (asas tempat tinggal),

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas sumber, dan

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan.

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan suatu pajak. Mardiasmo (2011;7) pada umumnya system pemungutan pajak dibagi atas tiga, yaitu:

1. *Official assessment system*

Adalah suatu system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak,

2. *Self assessment system*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang,

3. *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak).

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2011;5) terdiri dari:

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya, pajak penghasilan,
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang ada pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya: pajak pertambahan nilai,

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Misalnya : pajak penghasilan,

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut lembaga pemungutannya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Misalnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai,

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Misalnya: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak kabupaten/kota yaitu pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran.

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan.

## 12. Konsep Pajak Daerah

Pajak Daerah dan pajak Nasional merupakan suatu system perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat member beban yang adil.

Didalam undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011;12) Pajak Daerah, yang disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pada pasal 2 Undang-Undang diatas menetapkan jenis-jenis pajak daerah yang terbagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Pajak provinsi yang terdiri dari :
  - a. Pajak kendaraan bermotor
  - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - d. Pajak air permukaan; dan
  - e. Pajak rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
  - a. Pajak hotel
  - b. Pajak restoran
  - c. Pajak hiburan
  - d. Pajak reklame
  - e. Pajak penerangan jalan
  - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
  - g. Pajak parker
  - h. Pajak air tanah
  - i. Pajak sarang burung walet
  - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan pertokoan; dan
  - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dari dalam suatu daerah, apabila dirasakan perlu untuk menetapkan jenis pajak selain yang diatas, dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak lain yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bersifat bukan sebagai pajak retribusi.
2. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
3. Potensi memadai.
4. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
5. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
6. Menjaga kelestarian lingkungan.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011, Bab 1 Pasal 1 bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

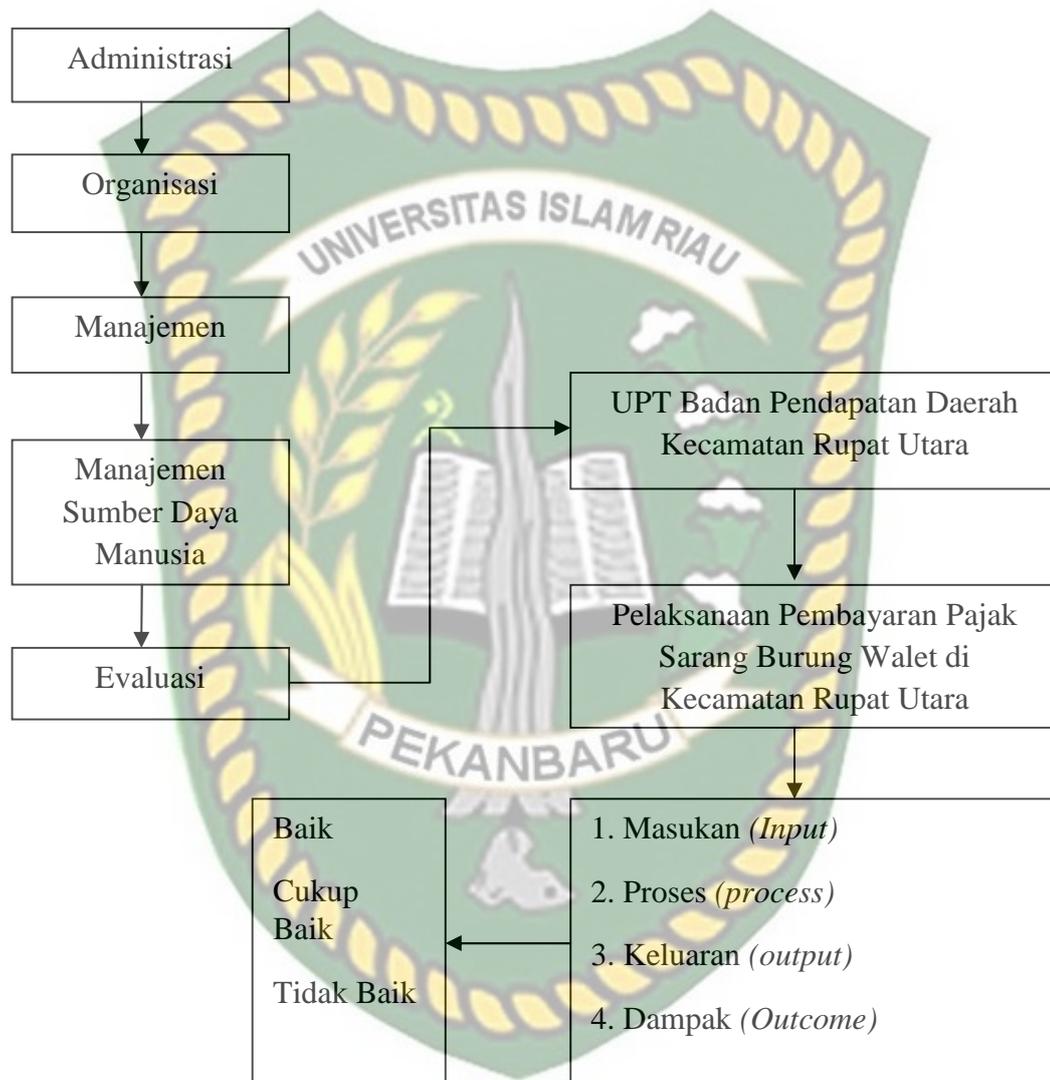
Didalam peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2012, Bab 1 Pasal 1 bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ruang lingkup Pajak Daerah hanya terbatas pada objek yang belum dikenakan oleh Negara (pusat). Disamping itu ada ketentuan bahan pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki objek pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Tarif pajak daerah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

#### **B. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir ini menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan dimensi variabel atau subvariabel yang mempengaruhi, dilandaskan dengan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan yang berguna untuk membangun pikiran dalam konsep dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

**Gambar II.1 : Model Kerangka Pikir Penelitian tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis**



Sumber: Hasil Modifikasi Peneliti, Tahun 2019

### C. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penilaian serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka perlulah kiranya penulis memaparkan penjelasan tentang konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

- a. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.
- b. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.
- c. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
- d. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran individu, organisasi, masyarakat, bangsa dan internasional yang efektif.
- e. Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

- f. Kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah.
- g. Evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan secara menyeluruh dari suatu kebijakan, mulai dari awal sebuah kebijakan dibuat sampai akhir dari kebijakan tersebut dilaksanakan.
- h. Pelaksanaan adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.
- i. Sistem adalah satu kesatuan yang utuh dan saling ketergantungan yang satu dengan yang lainnya sehingga jika rusak satu bagian maka akan menyebabkan ketidak seimbangannya bagian yang lain.
- j. Pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan Negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan.
- k. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah kabupaten Bengkalis dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah Kabupaten Bengkalis.
- l. Pajak Sarang Burung Walet adalah kontribusi wajib yang didapat oleh kabupaten Bengkalis melalui orang pribadi atau badan atas pengusahaan Sarang Burung Walet.
- m. Evaluasi kebijakan sebagai kegiatan fungsional yaitu evaluasi kegiatan dipandang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

- n. Input adalah mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran, SDM, peralatan, material dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan
- o. Process adalah dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana.
- p. Output adalah menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.
- q. Outcome adalah menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator output
- r. UPT merupakan singkatan dari istilah Unit Pelaksana Teknis.
- s. Pembayaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

#### **D. Operasional Variabel**

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, ukuran skala, untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat.

**Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.**

Konsep	Variabel	Dimensi Variabel	Sub Indikator	Kategori Ukuran
Evaluasi dapat diartikan sebagai proses mekanisme untuk memonitor, mensistematisasikan, dan meningkatkan aktivitas pemerintah dan hasil-hasilnya sehingga pejabat publik dalam pekerjaannya dimasa yang akan datang dapat bertindak serta bertanggung jawab, kreatif, dan seefesien mungkin. Wirawan (2011;16)	Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet	1. Masukan ( <i>Input</i> ) 2. Proses ( <i>process</i> ) 3. Keluaran ( <i>Output</i> ) 4. Dampak ( <i>Outcome</i> )	a. Sumber daya pendukung b. Sarana pendukung c. Aturan Hukum d. Sosialisasi a. Prosedur dan mekanisme b. Aktivitas pelayanan a. Produk yang dihasilkan b. Tingkat pencapaian tujuan a. Pengaruh terhadap target/sasaran b. Dampak luas	Ordinal

Sumber: Modifikasi Peneliti, Tahun 2019

### E. Teknik Pengukuran

Untuk menganalisis masing-masing indikator dari evaluasi pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis akan ditetapkan 3 ( tiga ) kategori ukuran yaitu, baik, cukup baik, kurang baik. Masing-masing alternatif jawabannya terdiri dari 3 kategori dengan pilihan skor sebagai berikut:

Kategori	Bobot	Interval
Baik	3	67%-100%
Cukup Baik	2	34%-66%
Kurang Baik	1	0%-33%

*Sumber: Sugiono 2005*

Keterangan

**Baik** :Apabila hasil penelitian tentang Evaluasi Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet berada pada interval 67% - 100%.

**Cukup baik** :Apabila hasil penelitian tentang Evaluasi Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet berada pada interval 34% - 66%.

**Kurang Baik** :Apabila hasil penelitian tentang objek wisata dan daya Tarik wisata berada pada interval 0% - 33%.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Tipe Deskriptif Kuantitatif*, yaitu statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiono 2013: 2013). Data dan informasi yang diperoleh dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.

Dengan alasan bahwa penulis melihat beberapa masalah atau gejala yang menunjukkan fenomena pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara.

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah unit analisis atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono; 199:2013). Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiono, 2010;80)

**Tabel III.1 Jumlah Populasi Penelitian Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.**

No	Identitas populasi	Populasi	Persentase
1	Kepala UPT	1	3%
2	Bendaharawan	1	3%
3	Pegawai/staff	4	11%
4	Wajib Pajak Sarang Burung Walet	29	83%
Jumlah		35	100%

Sumber : UPT Pendapatan Daerah Kec. Rupert Utara

### 2. Sampel

Sampel menurut Sugiono (2013:120) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representatif (mewakili).

Jumlah sampel 6 orang di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara, terdiri dari Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah 1 orang, Bendaharawan 1 orang, Pegawai/staff UPT 4 orang. Karena populasi berbeda, maka sampel dibagi 2 bagian variabel berbeda dengan tujuan agar dapat mewakili masing-masing generalisasi objek penelitian.

**Tabel III.2. Jumlah Sampel Penelitian Bagian Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.**

No	Bagian Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis	Populasi	Perhitungan	Sampel	persentase
1	Kepala UPT	1	1 x 100%	1	3 %
2	Bendaharawan	1	1 x 100%	1	3 %
3	Pegawai/staff	4	4 x 100%	4	11%
		6	Jumlah	6	17%

Sumber : UPT Pendapatan Daerah Kec. Rupert Utara

Pegawai UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara penulis mengambil teknik penarikan secara sensus, yaitu Teknik sensus adalah teknik penarikan yang diambil dengan seluruh populasi yang dijadikan sampel (Sugiono, 2010;85).

Sampel untuk masing-masing bagian tugas harus proporsional, jadi jumlah sampel dari tiap-tiap populasi dibagi sebagai berikut (sugiono :2005). Untuk jumlah pelaku usaha diambil 50% menggunakan simple random sampling/acak agar mempermudah pengumpulan informasi.

**Tabel III.3. Jumlah Sampel Penelitian Bagian Wajib Pajak Sarang Burung Walet UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.**

No	Bagian Pelaku Usaha	Populasi	Perhitungan	Sampel	Persentase
1	Wajib Pajak Sarang Burung Walet	29	29 x 50%	14	50%
		29	Jumlah	14	50%

Sumber : UPT Pendapatan Daerah kec. Rupert Utara

Sedangkan untuk mendapatkan data yang menjadi responden wajib pajak dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik simple random sampling agar mudah mengumpulkan informasi.

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### **a. Data Primer**

Yaitu yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan, dengan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pegawai UPT Badan Pendapatan daerah kecamatan Rupert Utara serta hasil kuisioner oleh wajib pajak sarang burung walet, guna memperoleh jawaban yang relevan dari permasalahan penelitian yang menggambarkan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara.

##### **b. Data Skunder**

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber data yang dapat menunjang objek yang diteliti berupa : arsip, literature serta laporan tertulis yang berhubungan dengan penjelasan mengenai Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data melalui metode sebagai berikut :

### 1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke kantor camat rupa utara guna mengetahui kondisi atau keadaan yang sebenarnya serta hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 2. Kuesioner

Kuesioner penelitian biasanya berisi tentang pertanyaan yang berstruktur dan jawaban yang cenderung kurang begitu mendalam.

Dalam penelitian ini penulis memberikan lembaran pertanyaan secara langsung kepada wajib pajak sarang burung walet yang dijadikan sampel agar diketahui seberapa besar tanggapan para responden.

### 3. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

### 4. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang dianggap bersangkutan dengan penelitian

## F. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder serta bahan-bahan yang diperlukan telah berhasil dikumpulkan dan kemudian dipisahkan atau dikelompokkan sesuai dengan keperluan dan kegunaan penelitian. Analisis data dilakukan secara

deskriptif dari keseluruhan data yang diperoleh untuk menggambarkan dan menjelaskan secara lebih rinci bagaimana kenyataan yang sebenarnya.

#### 1. Teknik persentase

- a. Menjabarkan numerik dari satu variabel dengan sebaran (distribusi) frekuensi dengan data tingkat ordinal
- b. Sebenarnya data numeric dianalisis berdasarkan bobot dan jumlah responden.
- c. Tipe skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert, diguna untuk mendapatkan persentase persepsi dari satu indikator.

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{total skor}}{\text{skor tertinggi}} \times 100\%$$

- d. Ukuran persepsi diambil dan dianalisis berdasarkan tentang pengukuran yang dirumuskan.
- e. Hasil persepsi setiap indikator direkapitulasi dan ditarik persentase untuk satu variabel evaluasi.
- f. Hasil persepsi disimpulkan berdasarkan rentang penilaian yang telah dirumuskan.

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Rupert Utara

Kecamatan Rupert Utara merupakan Kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Bengkalis yang Ibu kotanya Tanjung Medang, kecamatan Rupert Utara terletak dibagian wilayah utara dari Kabupaten Bengkalis yang berbatasan langsung dengan selat Malaka yang berjarak 25 mil menuju port diction malaka, dan mempunyai pantai pasir putih 12 km yang terletak didesa Tanjung Punak dan Teluk Rhu, yang berhadapan langsung dengan selat malaka yang merupakan jalur lintas kapal-kapal internasional dan juga sebagai wilayah wisata pesona pulau Rupert.

Wilayah Kecamatan Rupert Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rupert
3. Sebelah Hilir berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka

Luas wilayah Kecamatan Rupert Utara 628,50 km<sup>2</sup> (62,850 Ha), terdiri dari

lautan dan daratan yang terdiri dari delapan desa yaitu :

1. Desa Tanjung Medang (M. Nasir)
2. Desa Teluk Rhu (Hamzah)
3. Desa Tanjung Punak (Ismail.Z)
4. Desa Kadur (Tumadi)
5. Desa Titi Akar (Sukarto)
6. Desa Hutan Ayu (Panut, S.Pd)

7. Desa Suka Damai (Hariadi,s.Sos)

8. Desa Putri Sembilan (Hazri)

Disamping desa-desa yang ada didaratan juga terdapat 7 (tujuh) buah pulau kecil yang tidak ada penghuninya yaitu, Pulau Babi, Pulau Beting Aceh, Pulau Beruk, Pulau Kemunting, Pulau Tengah, Pulau Pajak, dan Pulau Simpur. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Rupert Utara berjumlah 13.324 jiwa, data RT, RW Dusun Desa se-kecamatan Rupert Utara terdiri dari 83 RT, 39 RW dan 22 Dusun, dan berbagai suku agama yang ada di kecamatan Rupert Utara antaranya, suku Melayu 35%, Cina keturunan 15%, suku Akit/asli 40%, campuran (Batak, Jawa dan lainnya) 10%. Sedangkan dari segi pencarian adalah masyarakat Kecamatan Rupert Utara sebagian besar Nelayan 50%, Petani/Kebun 30%, PNS 15%, dan buruh kasar 5%.

#### **B. Gambaran umum UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara**

UPT Pendapatan Daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pasal 17 ayat 2 UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Operasional Dinas Pendapatan Daerah Dilapangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 37 ayat 3 UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan camat.

Berdasarkan Perda diatas, UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rumat Utara merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rumat Utara juga memiliki visi, misi kedudukan, tugas, dan fungsi yang sama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Guna menghadapi persaingan yang semakin dekat dengan lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, suatu instansi pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis harus mampu mengakomodasikan perubahan profesionalisme pelayanan terhadap seluruh wajib pajak/retribusi daerah dalam Kabupaten Bengkalis.

Untuk mengantisipasi perubahan tersebut, disusun suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian visi yang merupakan pandangan jauh kedepan yang jelas menantang dan memberi motivasi partisipasi serta memperhatikan masukan pokok-pokok yang berkepentingan (*stakeholder*).

Adapun Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis ditetapkan sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai institusi pemerintah yang meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang optimal dan professional serta didukung peran aktif masyarakat.

- Misi :
1. Meningkatkan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib
  2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder instansi lain dan masyarakat.
  3. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur pengelolaan penerimaan daerah.
  4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat/ wajib pajak dengan motto mudah, cepat dan transparan.

Hal-hal yang mendasar inilah yang berusaha untuk diwujudkan oleh UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

### **C. Tugas Dan Fungsi UPT Badan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 03 Tahun 2012 tentang organisasidan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis, yaitu pada bagian 9 paragraf 1 pasal 21, yaitu Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok yaitu : tugas Dinas pendapatan daerah adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
- b. Perubahan kebijakan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### **D. Keadaan Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Menurut Pendidikan**

Keadaan pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara berdasarkan pendidikan adalah dapat dilihat sebagaimana table berikut ini:

**Tabel IV.1 : Keadaan Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Menurut Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA	1	16,7
3	Sarjana	5	83,5
4	Pasca Sarjana	-	
	<b>Total Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>

*Sumber : UPT Pendapatan Daerah 2018*

#### **E. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas Upt Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara**

Struktur organisasi di UPT Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut (Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Rincian Tugas UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis):

- a. Kepala UPT
- b. Kepala sub. Bagian Tata Usaha
- c. Berdahara Penerima Pembantu
- d. Staf UPT

Adapun uraian tugas struktur organisasi UPT badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

#### **A. Kepala UPT**

Kepala UPT dengan uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan mengolah data-data bidang pendapatan daerah di wilayah kecamatan sebagai bahan masukan dalam penyusunan program
- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak.
- c. Melakukan penetapan pajak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Bapenda Kabupaten Bengkalis.
- d. Melakukan pengawasan kepada personil UPT dalam melaksanakan tugas teknis maupun administrasi.
- e. Melakukan koordinasi dengan bidang dan instansi yang terkait dalam upaya meningkatkan PAD dan PBB.
- f. Tugas-tugas lain yang diarahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

#### **B. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha**

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dengan uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan
- b. Melaksanakan administrasi keuangan
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian
- d. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan kekayaan daerah
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

#### **C. Bendaharawan Pembantu Penerima (BPP)**

Bendaharawan pembantu penerima dengan Uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menerima setoran penerimaan pajak daerah
- b. Membukukan semua jenis penerimaan pajak daerah pada buku penerimaan sejenis dan buku kas umum
- c. Menyetorkan semua jenis penerimaan daerah pada kas daerah Kabupaten Bengkalis setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya

- d. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Kepala UPT

#### **D. Staf UPT**

Staf UPT dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Bendaharawan Pembantu Penerima (BPP) untuk melakukan pungutan pajak daerah
- b. Tugas-tugas yang diarahkan oleh Kepala UPT.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Dalam melakukan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, peneliti mengumpulkan data-data yang terdapat pada kuesioner penelitian yang diawali dengan identitas responden. Hal ini mempunyai tujuan untuk lebih mengetahui tingkat dari populasi yang dijadikan responden dalam melakukan penelitian ini.

Namun sebelum memasuki hasil dari penelitian, penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu identitas responden yang penulis anggap merupakan hal penting yang ingin penulis jelaskan sebagai berikut :

##### 1. Tingkat Pendidikan

pendidikan merupakan salah satu hal yang penting di dalam mempengaruhi pekerjaan dan diyakini sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk memberikan penilaian terhadap cara berpikir dan tingkat wawasan yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu penulis menilai sangat perlu memberikan penjelasan identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan akhir. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan terakhir responden penelitian dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel V.1. Identitas Responden Penelitian di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara. Berdasarkan Tingkat Pendidikan.**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	4	20%
2	SMP/Sederajat	6	30%
3	SMA/Sederajat	5	25%
4	DIII	-	-
5	Srta 1	5	25%
6	Srata 2	-	-
	Jumlah	20	100%

*Sumber : Data olahan peneliti 2019*

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat tingkat Pendidikan responden, berdasarkan data yang berhasil diperoleh peneliti bahwa tingkat Pendidikan responden di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis sebanyak dari 4 orang lulusan SD, sebanyak 6 orang lulusan SMP/ sederajat, sebanyak 5 orang lulusan SMA/ sederajat dan Srata 1 sebanyak 5 orang.

## 2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin untuk Mengevaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.. dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.2 Identitas Responden Penelitian di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara, Berdasarkan Jenis Kelamin.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase%
1	Laki-laki	19	95%
2	Perempuan	1	5%
	Jumlah	20	100%

Sumber : data olahan peneliti tahun 2019

Berdasarkan tabel V.2 diatas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden Penelitian di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara, laki-laki sebanyak 95% dan perempuan sebesar 5% responden.

### 3. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Identitas responden berdasarkan latar belakang usia untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara.**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase
1	20-30	6	6%
2	31-40	6	6%
3	41-50	8	40%
4	51-60	-	-
	Jumlah	20	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa usia responden penelitian di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara dengan kategori usia yang paling banyak yaitu 41-50 sebanyak 8 orang atau dengan persentase 40%, selanjutnya untuk usia 31-40 sebanyak 6 orang atau dengan persentase 30% dan usia 20-30 sebanyak 6 orang atau 30% dari jumlah keseluruhan responden.

#### **B. Hasil Instrumen Dan Pembahasan Data Dimensi Variabel Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.**

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan daerah dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah yang mempunyai kontribusi yang cukup besar sehingga perlu adanya upaya pengoptimalannya. Adapun salah satu potensi pajak daerah di Kecamatan Rupert Utara adalah pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet sebagai salah satu pajak daerah dalam pengelolaannya diadakan peningkatan terhadap PAD. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis khususnya UPT Pendapatan Daerah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pajak sarang burung walet. Setelah dilakukan observasi dilapangan di Kecamatan Rupert Utara oleh peneliti ditemukan permasalahan terhadap proses pembayaran pajak sarang burung walet. Hal ini perlu adanya Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet oleh UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara.

Setelah mendistribusikan kuesioner kepada responden penelitian yakni pegawai UPT Bapenda, Pelaku Usaha atau Wajib Pajak dan melakukan wawancara kepada Kepala UPT Bapenda. Maka hasil responden baik hasil olahan kuesioner dan wawancara akan penulis jelaskan secara berurutan perindikator yakni sebagai berikut:

### 1. Masukan (*Input*)

Evaluasi pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet dapat diukur salah satunya dengan melihat *Input* (masukan), yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan,

Ada beberapa komponen tertentu yang selalu ditemukan dalam setiap melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, yaitu tujuan dan metode didalam mengevaluasi sebuah pelaksanaan kebijakan. Walaupun perencanaan yang baik itu tidak menjadi jaminan untuk keberhasilan sebuah kebijakan yang efektif, perencanaan yang buruk selalu akan berdampak terhadap pencapaian hasil sebuah kebijakan. Maka didalam perumusan kebijakan perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai sumber hal itu sekaligus akan berarti tercapainya pula tujuan-tujuan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Untuk mengetahui hasil kuesioner jawaban atau tanggapan dari responden wajib pajak yang berjumlah 14 orang responden terhadap indikator *Input* (masukan) yang terdiri dari 4 dimensi indikator yaitu Sumber Daya Pendukung, Bahan-bahan Dasar Pendukung, Aturan Hukum, dan sosialisasi. Untuk itu perlu kiranya diketahui

dari jawaban responden tentang indikator Input dalam Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.7

**Tabel V.4 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Wajib Pajak di Kecamatan Rupert Utara Terhadap Indikator Input**

Varabel	Dimensi	No	Skala Nilai						Total Responden	Skor Per Dimensi	Total Skor
			3		2		1				
			F	%	F	%	F	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INPUT	Sumber Daya Pendukung	1	5	35.7	7	50	2	14.3	14	31	257
		2	5	35.7	7	50	2	14.3	14	31	
		3	4	28.6	7	50	3	21.4	14	29	
	Bahan-bahan Dasar Pendukung	4	5	35.7	6	42.9	3	21.4	14	30	
		Aturan Hukum	5	5	35.7	7	50	2	14.3	14	
	6		4	28.6	7	50	3	21.4	14	29	
	Sosialisasi	7	3	21.4	5	35.7	6	42.9	14	25	
		8	3	21.4	6	42.9	5	35.7	14	26	
		9	3	21.4	5	35.7	6	42.9	14	25	

Sumber: Olahan Peneliti 2019

Skor tertinggi indikator

$$14 \times 3 = 42 \times 9 = 378$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$$

$$\% = \frac{257}{378} \times 100$$

$$= 67.9\% \text{ (Baik)}$$

Dari tabel distribusi tanggapan responden wajib pajak diatas dapat diketahui bahwa dari 14 responden yang menjawab 4 Dimensi Indikator dapat dijelaskan pada

dimensi sumber daya pendukung di pertanyaan 1 yang menjawab pada skala 3 (Baik) sebesar 35.7%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 50% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 14.3%. Di pertanyaan 2 yang menjawab pada skala 3 (Baik) sebesar 35.7%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 50% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 14.3%. Di pertanyaan 3 yang menjawab pada skala 3 (Baik) sebesar 28.6%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 50% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 21.4%. Dengan alasan bahwa sumber daya manusianya masih belum optimal dalam melaksanakan pembayaran pajak.

Selanjutnya pada dimensi indikator Bahan-bahan Dasar Pendukung terdapat 1 pertanyaan yang dijawab pada skala 3 (Baik) sebesar 35.7%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 42.9% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 21.4%.

Kemudian pada dimensi indikator Aturan Hukum ditetapkan sebanyak 2 pertanyaan dimana pertanyaan 1 di jawab pada skala 3 (Baik) sebesar 35.7%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 50% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 14.3%, di pertanyaan 2 di jawab pada skala 3 (Baik) sebesar 28.6%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 50% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 21,4%, dengan alasan peraturan yang tersedia belum di ikuti secara baik.

Selanjutnya pada dimensi indikator Sosialisasi terdapat 3 pertanyaan dimana pertanyaan 1 di jawab pada skala 3 (Baik) sebesar 21.4%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 35.7% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 42.9%, pertanyaan 2 di jawab

pada skala 3 (Baik) sebesar 21.4%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 42.9% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 35.7%, dan pertanyaan 3 di jawab pada skala 3 (Baik) sebesar 21.4%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 35.7% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 42.9%, dengan alasan bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak UPT masih kurang optimal dilakukan.

Dari keseluruhan tanggapan responden masyarakat wajib pajak sarang burung walet pada indikator Input maka didapati persentase sebesar 67.9% pada kategori Baik pada Interval 67%-100%.

Selanjutnya hasil wawancara terstruktur peneliti dengan Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara pada Indikator *Input* yang berjumlah 6 orang informan, yang mana dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel V.5** Tabel Hasil Wawancara Terstruktur dengan Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupaat Utara Terhadap Indikator *Input*

No	Indikator	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Masukan (Input)	Menurut Bpk/ibu, apakah sumber sumber daya yg ada berupa sarana prasarana, aturan hukum, sosialisasi, sudah cukup baik dalam membantu proses pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet ?	<b>1. Kepala UPT (Idris, Amd)</b> “Saya rasa cukup baik karena seperti yg saudara ketahui sarana prasarana kami sudah memadai, aturan hukum juga sudah tersedia dan proses sosialisasi dari pemerintah juga telah dilaksanakan dengan baik dengan memanfaatkan media media cetak dalam memberikan informasi tentang kewajiban membayar pajak sarang burung walet”
2.			<b>2. Bendaharawan (Yudi Sonata)</b> “Menurut saya sudah baik, karena sarana prasarana kami sudah maksimal, aturan aturan sudah jelas, serta proses sosialisasi sudah di laksanakan”
3.			<b>3. Pegawai (Supriadi, S.Kom)</b> “Untuk sekarang ini sarana prasarana kami sudah sangat mendukung kemudian aturan berupa perda dan perbub juga ada, sedangkan proses sosialisasi sudah dilaksanakan sebelumnya”
4.			<b>4. Pegawai (Nurahim, S.Kom)</b> “Menurut saya sudah cukup baik, karena sarana prasarana kami sudah baik, aturan hukum sudah cukup jelas dan sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak sarang burung walet juga sudah dilakukan”
5.			<b>5. Pegawai (Siti Maya, ST)</b> “Saya rasa sudah cukup mendukung karena sarana prasarana yg kami ada sudah sangat baik, ketersediaan aturan hukum juga sudah sangat jelas dan sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak sarang burung walet juga sudah dilakukan”
6.			<b>6. Pegawai (Usman, S.Pd.I)</b> “Menurut saya sudah sangat mendukung, dilihat dari sarana prasarana, aturan hukum sudah tersedia sangat baik. Kemudian proses sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak juga sudah dilakukan dengan baik”

Berdasarkan tabel V.5 UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara memiliki sumber daya pendukung, bahan-bahan dasar pendukung serta aturan hukum yang Baik dan sosialisasi yang sudah cukup baik, artinya pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet di UPT Badan Pendapatan daerah Kecamatan Rupert Utara sudah Baik pada indikator Input.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan bahwasannya sarana dan prasarana sudah cukup baik dalam mendukung pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet, namun dari dimensi sosialisasi masih belum ditemukan spanduk maupun brosur-brosur sebagai sosialisasi kepada masyarakat dalam menyadarkan kewajiban membayar pajak.

Dari hasil wawancara dengan pegawai dan hasil kuesioner tanggapan wajib pajak, dan observasi dilapangan yang telah peneliti paparkan diatas maka, dapat disimpulkan bahwasannya indikator Masukan (*Input*) berada pada kategori Baik, namun masih perlunya peningkatan sosialisasi yang lebih efektif dalam memberi kesadaran dan pengetahuan tentang wajib pajak sarang burung walet di kecamatan Rupert Utara.

Faktor penghambat Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis pada indikator Masukan (*Input*) yaitu Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh UPT Bapenda kepada wajib pajak mengenai pajak sarang burung walet, sehingga

masyarakat kurang mengetahui aturan dalam membayar pajak, dengan kurangnya kegiatan sosialisasi ini maka membuat wajib pajak tidak mentaati aturan yang mengatur tentang pajak. Hal ini membuat mereka cenderung apatis dan menunggak pembayaran pajak setelah lewat jatuh tempo.

## 2. Proses (*Process*)

Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat atau wajib pajak sarang burung walet oleh pemerintah kabupaten Bengkalis melalui UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupa Utara.

Untuk mengetahui hasil kuesioner jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat wajib pajak sarang burung walet yang berjumlah 14 orang terhadap indikator Input (masukan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.9 berikut:

**Tabel V.6 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Atau Wajib Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Indikator *Process***

Varabel	Dimensi	No	Skala Nilai						Total Responden	Skor Per Dimensi	Total Skor
			3		2		1				
			F	%	F	%	F	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROSES	Prosedur dan Mekanisme	1	5	35.7	7	50	2	14.3	14	31	262
		2	4	28.6	8	57.1	3	21.4	14	31	
		3	3	21.4	8	57.1	3	21.4	14	28	
		4	3	21.4	8	57.1	3	21.4	14	28	
	Aktivitas Pelayanan	5	3	21.4	8	57.1	3	21.4	14	28	
		6	3	21.4	8	57.1	3	21.4	14	28	
		7	3	21.4	8	57.1	3	21.4	14	28	
		8	5	35.7	7	50	2	14.3	14	31	
		9	3	21.4	9	64.3	2	14.3	14	29	

*Olahan peneliti 2019*

Skor tertinggi indikator

$$14 \times 3 = 42 \times 9 = 378$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$$

$$\% = \frac{262}{378} \times 100$$

$$= \mathbf{69.3\% \text{ (Baik)}}$$

Dari tabel distribusi tanggapan responden wajib pajak diatas dapat diketahui bahwa dari 14 responden yang menjawab 4 Dimensi Indikator dapat dijelaskan pada dimensi Prosedur dan Mekanisme di pertanyaan 1 yang menjawab pada skala 3 (Baik) sebesar 35.7%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 50% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 14.3%. Di pertanyaan 2 yang menjawab pada skala 3 (Baik) sebesar 28.6%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 57.1% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 21.4%. Di pertanyaan 3 yang menjawab pada skala 3 (Baik) sebesar 21.4%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 57.1% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 21.4%, pada pertanyaan 4 yang menjawab pada skala 3 (Baik) sebesar 21.4%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 57.1% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 21.4%, kemudian pada pertanyaan 5 yang menjawab pada skala 3 (Baik) sebesar 21.4%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 57.1% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 21.4%, dengan alasan bahwa prosedur pelaksanaan belum tertib dan belum optimal dilaksanakan.

Selanjutnya pada dimensi indikator Aktivitas Pelayanan terdapat 4 pertanyaan pada pertanyaan 1 yang menjawab pada skala 3 (Baik) sebesar 21.4%, pada skala 2

(Cukup Baik) sebesar 57.1% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 21.4%, pada pertanyaan 2 yang menjawab pada skala 3 (Baik) sebesar 21.4%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 57.1% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 21.4%, kemudian pada pertanyaan 3 yang menjawab pada skala 3 (Baik) sebesar 35.7%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 50% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 14.3%, dan pertanyaan 4 yang menjawab pada skala 3 (Baik) sebesar 21.4%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 64.3% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 14.3%, dengan alasan responden bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak UPT sudah baik namun, belum optimal dan memuaskan wajib pajak.

Dari keseluruhan tanggapan responden masyarakat wajib pajak sarang burung walet pada indikator Proses maka didapati persentase sebesar 69.3% pada kategori Cukup Baik pada Interval 67%-100%.

Selanjutnya hasil wawancara terstruktur peneliti dengan Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara pada Indikator Proses yang berjumlah 6 orang responden, yang mana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.7** Tabel Hasil Wawancara Terstruktur dengan Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Terhadap Indikator *Process*

No	Indikator	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Proses ( <i>process</i> )	Menurut Bpk/ibu, bagaimana bapak/ibu serta wajib pajak sarang burung walet dalam mengikuti prosedur dan mekanisme yg ada?	<b>1. Kepala UPT (Idris, Amd)</b> “Pihak kami telah mengikuti prosedur dan mekanisme pelaksanaan, baik dari segi pelayanan dan pelaksanaan pemungutan, namun kalau wajib pajak hanya sebagian yg betul betul mengikuti prosedur dan mekanisme yg ada”
2.			<b>2. Bendaharawan (Yudi Sonata)</b> “Menurut saya wajib pajak sarang burung walet ini kebanyakan tidak mengikuti prosedur dan mekanisme yg ditetapkan pemerintah yg mengikuti itu hanya sebagian kecil selebihnya itu tidak. Kalau dari pihak kami, kami sudah memberikan pelayanan dan mengikuti prosedur dengan sangat baik”
3.			<b>3. Pegawai (Supriadi, S.Kom)</b> “Pihak kami selalu mengikuti prosedur pelaksanaan pelayanan dan pemungutan yg ditetapkan, namun kalau dari wajib pajak sarang burung walet ada sebagian yg tidak mengikuti dengan benar tentang mekanisme dan prosedur yg ada”
4.			<b>4. Pegawai (Nurahim, S.Kom)</b> “Dari pihak kami selalu mengikuti prosedur dan mekanisme yg ada, karena itu alasan kami bergerak dan bekerja. Namun kalau pihak wajib pajak mereka banyak yg tidak mengikuti karena mungkin tidak ada kesadaran dari diri mereka sebagai wajib pajak”
5.			<b>5. Pegawai (Siti Maya, ST)</b> “Sebagai pegawai disini menurut saya kami selalu mengikuti prosedur pelaksanaan dengan baik, sedangkan wajib pajak itu hanya sebagian yg taat mengikuti”
6.			<b>6. Pegawai (Usman, S.Pd.I)</b> “Kalau dari pihak UPT, kami itu sudah mengikuti prosedur dan mekanisme pelaksanaan dengan baik, kalau wajib itu menurut saya kurang baik dalam mengikuti prosedur dan mekanisme yg ada”

Olahan peneliti 2019

Berdasarkan tabel V.7 bahwa prosedur dan mekanisme serta aktivitas pelayanan bisa dikatakan cukup baik, yang berarti hasil wawancara pada indikator Proses sudah cukup Baik dalam Pelaksanaan pembayaran Pajak sarang Burung walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rumat Utara.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dari indikator Proses (*Process*), peneliti melihat bahwasannya setiap prosedur yang ditetapkan tidak diikuti sebagian wajib pajak sedangkan aktivitas pelayanan sudah Baik.

Dari hasil wawancara pegawai dan hasil kuesioner jawaban responden wajib pajak, yang telah penulis paparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya pada indikator Proses (*Process*) dapat dikategorikan Baik, namun perlu adanya antisipasi dari pihak UPT agar lebih menertibkan wajib pajak dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, karena masih adanya wajib pajak yang tidak mengikuti prosedur pembayaran dengan baik.

Faktor penghambat Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rumat Utara Kabupaten Bengkalis pada indikator Proses (*Process*) Menurut penuturan pihak UPT Bapenda Kecamatan Rumat Utara Yang menjadi hambatan dari indikator proses (*process*) adalah para pelaku usaha wajib pajak sarang burung walet banyak yang tidak mengikuti prosedur dan mekanisme pembayaran yang benar sehingga menjadi kendala tidak optimalnya proses pelaksanaan pembayaran pajak tersebut

### 3. Keluaran (*Output*)

Yaitu keluaran atau hasil dari pelaksanaan kebijakan. Adapun bentuk dan pendekatan yang dilakukan didalam melakukan evaluasi, penentuan tujuan evaluasi akan selalu berkenaan dengan apa yang diharapkan dari pelaksanaan suatu evaluasi yaitu output (Hasil).

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat wajib pajak sarang burung walet yang berjumlah 14 orang terhadap Indikator Output (Hasil). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.8 berikut:

**Tabel V.8 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Atau Wajib Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Indikator *Output***

Variabel	Dimensi	No	Skala Nilai						Total Responden	Skor Per Dimensi	Total Skor
			3		2		1				
			F	%	F	%	F	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OUTPUT	Produk yang Dihasilkan	1	4	28.6	8	57.1	2	14.3	14	30	86
		2	4	28.6	8	57.1	2	14.3	14	30	
	Tingkat Pencapaian Tujuan	3	2	14.3	8	57.1	4	28.6	14	26	

*Olahan peneliti 2019*

Skor tertinggi indikator

$$14 \times 3 = 42 \times 3 = 126$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$$

$$\% = \frac{86}{126} \times 100$$

$$= 68.2\% \text{ (Baik)}$$

Dari tabel distribusi tanggapan responden wajib pajak diatas dapat diketahui bahwa dari 14 responden yang menjawab 2 Dimensi Indikator dapat dijelaskan pada dimensi Produk yang Dihasilkan di pertanyaan 1 yang menjawab pada skala 3 (Baik) sebesar 28.6%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 57.1% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 14.3%. Di pertanyaan 2 yang menjawab pada skala 3 (Baik) sebesar 28.6%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 57.1% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 14.3%.

Selanjutnya pada dimensi indikator Tingkat Pencapaian Tujuan terdapat 1 pertanyaan pada pertanyaan 1 yang menjawab pada skala 3 (Baik) sebesar 14.3%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 57.1% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 28.6%.

Dari keseluruhan tanggapan responden masyarakat wajib pajak sarang burung walet pada indikator Output maka didapati persentase sebesar 68.2% pada kategori Baik pada Interval 67%-100%.

Selanjutnya hasil wawancara terstruktur peneliti dengan Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupa Utara pada Indikator Output yang berjumlah 6 orang Informan, yang mana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.9 Tabel Hasil Wawancara Terstruktur dengan Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Terhadap Indikator Output**

No	Indikator	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Masukan (Input)	Menurut Bpk/ibu, bagaimana tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sarang burung walet serta pengaruhnya terhadap realisasi dan target hasil pajak walet di UPT?	<b>1. Kepala UPT (Idris, Amd)</b> “Tingkat kesadaran wajib pajak bisa dikatakan buruk karena berdasarkan kejadian-kejadian yg lalu, begitu sedikit yg datang membayar pajak sehingga harus ada inisiatif dari pegawai kami yg datang sendiri kerumah wajib pajak untuk memungut pajak tersebut. Sebenarnya hal tingkat kesadaran ini sangat berpengaruh terhadap hasil pajak.
2.			<b>2. Bendaharawan (Yudi Sonata)</b> “Realisasi hasil pajak sarang burung walet selalu kurang dari sasaran yg kami tetapkan, disebabkan itu tadi, susah nya wajib pajak dalam membayar pajak sarang burung walet ini. Mereka bukan tidak tahu tapi mereka itu memang kurang kesadaran dalam membayar wajib pajak padahal dibulan sebelum-sebelumnya dh diminta tapi untuk kewajiban bulan berikutnya masih tetap harus kami yg datang meminta kerumah”
3.			<b>3. Pegawai (Supriadi, S.Kom)</b> “Tingkat kesadaran wajib pajak disini memang bisa dikatakan kurang baik, karena itu tadi yg datang membayar sendiri itu sangat sedikit selebihnya kami yg kerumah mereka minta tagihan pajak,
4.			<b>4. Pegawai (Nurahim, S.Kom)</b> “Tingkat kesadaran wajib pajak sarang burung walet di kecamatan Rupert Utara ini kurang baik, karena mereka itu sering telat bayar, kadang ada yg menunggak. Maka pengaruhnya terhadap hasil realisasi dan target yg kami tetapkan selalu kurang sasaran”
5.			<b>5. Pegawai (Siti Maya, ST)</b> “Kurang baik, karena para wajib pajak ini kebanyakan telat bayar dan kemudian ada beberapa wajib pajak kami yg harus kerumah mereka untuk memungut pajak sarang burung walet, hal ini lah yg menjadi kendala dalam realisasi hasil pajak walet”
6.			<b>6. Pegawai (Usman, S.Pd.I)</b> “Tingkat kesadaran wajib pajak disini memang kurang baik, hal ini saya katakan karena kami sering sekali datang kerumah mereka untuk memungut pajak padahal sesuai aturan mereka lah yg datang sendiri membayar, maka dari itu hasil dari realisasi selalu tak sesuai target”

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak yang kurang baik memberi pengaruh buruk terhadap hasil realisasi dan target pajak sarang burung walet, ini berarti dari hasil wawancara pada indikator Output bahwa pelaksanaannya belum maksimal.

Dari hasil observasi peneliti dari indikator Keluaran (*Output*), peneliti melihat bahwasannya kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sarang burung walet dan pengetahuan wajib pajak tentang sistem perhitungan sendiri (*self assessment*) dan tujuan ia membayar pajak belum dikatakan baik.

Dari hasil kuesioner, wawancara dan observasi yang telah penulis paparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya pada indikator Keluaran (*Output*) dapat dikategorikan Cukup Baik, namun perlu adanya antisipasi dari pihak UPT agar lebih mengupayakan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Faktor penghambat Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis pada indikator Masukan (*Input*) Kurangnya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak sarang burung walet, dalam hal ini wajib pajak tidak antusias dalam membayar pajak sehingga menjadi kendala terhadap hasil dari pajak sarang burung walet serta realisasi target dan sasaran tidak sesuai dengan yang ditetapkan.

#### 4. Dampak (*Outcome*)

Evaluasi ditujukan untuk menganalisa dampak pembangunan yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan dan dinikmati oleh penerima pembangunan. Jadi evaluasi sama sekali berbeda dengan jenis penilaian kebijakan apalagi program pengawasan. Seyogyanya evaluasi tidak hanya terdiri dari analisa kuantitatif atas dampak pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mencakup penjelasan mengenai ketercapaian atau tidak ketercapaian, serta uraian mengenai implikasi kebijakan yang mungkin terjadi.

*Outcome* yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan. Indikator ini menunjukkan pengaruh, baik itu positif maupun negative yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan dan asumsi yang telah digunakan.

Untuk mengetahui hasil kuesioner jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat wajib pajak sarang burung walet terhadap indikator *Outcome* (Dampak). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.14 berikut:

**Tabel V.10 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Atau Wajib Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Indikator *Outcome***

Variabel	Dimensi	No	Skala Nilai						Total Responden	Skor Per Dimensi	Total Skor
			3		2		1				
			F	%	F	%	F	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OUTCOME	Pengaruh Terhadap Target Sasaran	1	2	14.3	11	78.6	1	7.1	14	29	57
	Dampak Luas	2	2	14.3	10	71.5	2	14.3	14	28	

Sumber: data olahan peneliti 2018

Skor tertinggi indikator

$$14 \times 3 = 42 \times 2 = 84$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$$

$$\% = \frac{55}{84} \times 100$$

$$= 67.8\% \text{ (Baik)}$$

Dari tabel distribusi tanggapan responden wajib pajak diatas dapat diketahui bahwa dari 14 responden yang menjawab 2 Dimensi Indikator dapat dijelaskan pada dimensi Pengaruh Terhadap Target Sasaran di pertanyaan 1 yang menjawab pada skala 3 (Baik) sebesar 14.3%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 78.6% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 7.1%. Selanjutnya pada dimensi indikator Dampak Luas terdapat 1 pertanyaan pada pertanyaan 1 yang menjawab pada skala 3 (Baik) sebesar 14.3%, pada skala 2 (Cukup Baik) sebesar 71.5% dan pada skala 1 (Tidak Baik) sebesar 14.3%

Dari keseluruhan tanggapan responden masyarakat wajib pajak sarang burung walet pada indikator Outcome maka didapati persentase sebesar 67.8% pada kategori Baik pada Interval 67%-100%.

Selanjutnya hasil wawancara terstruktur peneliti dengan Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara pada Indikator *Outcome* yang berjumlah 6 orang responden, yang mana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.11** Tabel Hasil Wawancara Terstruktur dengan Pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Terhadap Indikator *Outcome*

No	Indikator	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Keluaran <i>(Outcome)</i>	Menurut Bpk/ibu, bagaimana dampak dari pajak sarang burung walet ini terhadap pembangunan dan pengaruh terhadap PAD?	<p><b>1. Kepala UPT (Idris, Amd)</b>            “Masalah dari dampak pembangunan itu bisa jadi pajak sarang burung walet ini berkontribusi karena sebagian dana dari hasil pembangunan suatu daerah khususnya kabupaten bengkalis dari hasil PAD, dikarenakan pajak walet ini juga berpengaruh terhadap PAD di kabupaten maka bisa dikatakan ada pengaruh dan dampaknya bagi pembangunan di kabupaten dan kecamatan Rupert Utara”</p>
2.			<p><b>2. Bendaharawan (Yudi Sonata)</b>            “Menurut saya peran dalam pembangunan disini itu ada, karena pengaruh dari pajak sarang burung walet ini juga sungguh baik dalam kontribusinya terhadap PAD, yg mana hasil PAD ini akan berdampak terhadap pembangunan suatu wilayah”</p>
3.			<p><b>3. Pegawai (Supriadi, S.Kom)</b>            “Pembangunan di Rupert Utara sekarang itu bisa dikata sedikit baik, namun kalau masalah dampak dari pajak sarang burung walet itu kemungkinan ada pengaruhnya, karena hasil dari pajak ini dapat menambah hasil PAD dikabupaten. Jadi, hasil PAD yg digunakan untuk pembangunan daerah maka bisa dipastikan ada peran dari pajak sarang burung walet juga”</p>
4.			<p><b>4. Pegawai (Nurahim, S.Kom)</b>            “Menurut saya pasti ada dampaknya terhadap pembangunan, karena hasil dari pajak sarang burung walet ini berperan terhadap penambahan PAD, yg mana PAD itu berperan terhadap pembangunan suatu daerah”</p>
5.			<p><b>5. Pegawai (Siti Maya, ST)</b>            “Menurut saya pajak sarang burung walet ini pasti ada dampak terhadap pembangunan disini karena hasil pajak ini pasti berkontribusi terhadap PAD kabupaten. Dimana, besar kecilnya PAD akan berdampak terhadap lajunya pembangunan disini”</p>
6.			<p><b>6. Pegawai (Usman, S.Pd.I)</b>            “Menurut saya pasti ada dampaknya di dalam pembangunan disini, karena hasil pajak sarang burung walet ini pasti akan menambah PAD kabupaten. Jadi kalau besar nya PAD maka dampak pembangunan juga besar”</p>

Olahan peneliti 2019

Berdasarkan tabel V.11 menunjukkan bahwa peran pajak sarang burung walet berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dampak pembangunan di daerah kecamatan Rupert Utara khususnya sudah memberi pengaruh terhadap lajunya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari hasil PAD atas sumbangan dari pajak sarang burung walet, ini berarti hasil wawancara dengan pegawai UPT Badan Pendapatan daerah Kecamatan Rupert Utara pada indikator Outcome dapat dikatakan Baik.

Dari hasil kuesioner, wawancara dan observasi yang telah penulis paparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya pada indikator Dampak (*Outcome*) dapat dikategorikan Baik.

Faktor penghambat Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis pada indikator Dampak (*Outcome*) Menurut dari pihak UPT BAPENDA Kecamatan Rupert Utara yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan ini dikarena banyaknya penunggakan dan tingkat kesadaran wajib pajak sarang burung walet dalam membayar pajak kurang baik sehingga berpengaruh terhadap hasil realisasi dari pajak sarang burung walet yang mengakibatkan kurang masukan bagi PAD.

### C. Hasil Rekapitulasi Dilihat Secara Bersama-sama Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis

Dari pembahasan masing-masing indikator diatas selanjutnya untuk mengetahui keseluruhan tanggapan responden Wajib pajak di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet, maka dilakukan rekapitulasi responden wajib pajak sarang burung walet dalam bentuk tabel jawaban responden yang dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel V.12** Tabel Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis

Indikator	No	Dimensi	Persentase
Masukan (Input)	1	Sumber Daya Pendukung	<b>67.9%</b> <b>(Baik)</b>
	2	Bahan-bahan Dasar Pendukung	
	3	Aturan Hukum	
	4	Sosialisasi	
Proses (Process)	5	Prosedur dan Mekanisme	<b>69.3%</b> <b>(Baik)</b>
	6	Aktivitas Pelayanan	
Keluaran (Output)	7	Produk Yang Dihasilkan	<b>68.2%</b> <b>(Baik)</b>
	8	Tingkat Pencapaian Tujuan	
Dampak (Outcome)	9	Pengaruh Terhadap Target Sasaran	<b>67.8%</b> <b>(Baik)</b>
	10	Dampak Luas	
Rata-rata			<b>68,3% (Baik)</b>

Sumber: data olahan Peneliti 2019

Dari tabel hasil rekapitulasi diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis berada pada persentase 68,3% pada kategori Baik, berada pada interval 67%-100%. Artinya Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara sudah terlaksana dengan baik berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden diatas, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi seperti halnya kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang berarti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara kepada masyarakat khususnya wajib pajak, selain itu juga masih adanya penunggakan pajak dari wajib pajak sarang burung walet sehingga mempengaruhi realisasi dan target pencapaian.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penilaian pada indikator “*Input*” didalam pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara berada pada kategori Baik.
2. Berdasarkan penilaian pada indikator “*Proses*” didalam pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara berada pada kategori Baik.
3. Berdasarkan penilaian pada indikator “*Output*” didalam pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara berada pada kategori Baik.
4. Berdasarkan penilaian pada indikator “*Outcome*” didalam terhadap pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet di UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Rupert Utara berada pada kategori Baik.
5. Bahwa dari hasil penelitian, menunjukkan Pelaksanaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan

Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Yang Ditentukan Dari 4 Indikator  
Yaitu *Input, Process, Output, Dan Outcome* dapat dikatakan Baik.

## B. Saran

1. Untuk mencapai target pajak sarang burung walet pihak UPT Bapenda sebaiknya harus melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat secara rutin, sehingga masyarakat khususnya pelaku usaha sarang burung walet dapat mengetahui arti penting akan kewajiban dalam membayar pajak.
2. Diharapkan kesadaran dan peran serta pengusaha walet lebih ditingkatkan lagi dan memiliki rasa tanggung jawab akan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak sarang burung walet.
3. Sebaiknya dilakukan pengawasan secara rutin pada setiap pembayaran pajak sarang burung walet di Kecamatan Rupat Utara serta pihak UPT Bapenda harus memberikan sanksi yang lebih tegas kepada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak.
4. Sebaiknya wajib pajak perlu mengikuti prosedur dan mekanisme yang telah tersedia sehingga tidak menghambat pelaksanaan pembayaran.
5. Pemanfaatan media cetak sebagai media sosialisasi perlu ditingkatkan lagi sehingga mampu memperluas menyebarnya informasi yang ingin disampaikan kepada wajib pajak

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, Said Zainal, 2006. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Suara Bebas
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Setia
- Amirullah, dan Haris, Budiono, 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Andrew, Colin Mac, Ichlasul Amal, 2003, *Hubungan Pusat Daerah Dalam Pembangunan*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Bohari, H. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Brantas, M.Pd. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung: Alfabeta
- Draha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Ernie Tisnamwati S, Kurniawan Saifullah. 2009. *Pengantar Manajemen*. Salemba Empat, Jakarta
- Gomes Faustino Agustino, 2006. *Produktivitas dalam Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Hapsari, Ratna. 2013. *Sejarah: kelompok peminatan ilmu-ilmu social*. Jakarta. Erlangga
- Hamim, Sufian, dan Indra Mukhlis, 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen (Studi, Ilmu, Teori Konsep dan Aplikasi)*. Bandung: Multi Grafindo.
- Handoko, T. Hani, 2009, *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi revisi, Jakarta: Bumi Aksara
- Islamy, M. Irfan. 2002. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta
- Khalil, Samihah dkk. 2004. *Dasar dan Analisis Fiskal*. PACE. Sintok

- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Rosda
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan (edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi Offset
- Nurcholis, Hanif. 2007. *teori dan praktek pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta : Grasindo
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama
- Siagain, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siswanto, B, 2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Bumi Aksara.
- Sjafrizal, 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Syafie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Syafiie, Inu Kencana, 2019. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor, Erlangga.
- Syaukani, dkk, 2002. *Kebijakan Publik, Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka
- Terry, George R dan Leslie W. Rue, 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara
- Thoha, Miftah. 2011. *Ilmu administrasi publik kontemporer*. Jakarta. Kencana.
- Wahab, Budi, 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Malang: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Wirawan, 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Proses*, Jakarta: Rajawali Press

Zulkifli, 2009. *Fungsi-fungsi Manajemen*. FISIPOL UIR Pekanbaru

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru :

UIR Press

Dokumentasi :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- 
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 03 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Sarang Burung Wallow
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011